



LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN - 1

Tahun 2024

**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KAB. LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Azza Wa Jallah atas perkenaan-Nya sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan baik.

Laporan Evaluasi Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang Kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada triwulan I Tahun 2024 dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi perencanaan Program dan Anggaran di tahun berikutnya.

Kami sadar bahwa laporan akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 17 April 2024

Kepala Badan,



GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. 1
NIP. 19710502 199208 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang
 B. Maksud dan Tujuan
 C. Gambaran Umum Organisasi
 D. Isu Strategis
 E. Landasan Hukum
BAB II PERENCANAAN KINERJA
 A. Rencana Strategis
 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 A. Capaian Kinerja
 B. Realisasi Keuangan
BAB IV PENUTUP
 4.1. Permasalahan
 4.2. Rekomendasi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disepakati melalui Perjanjian Kinerja, maka perlu disusun Laporan Kinerja Intern Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian laporan ini diharapkan Perangkat Daerah dapat mengontrol perkembangan dan kemajuan Perangkat Daerah dalam mengukur kinerja Perangkat Daerahnya.

Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Laporan ini menggambarkan diantaranya pengukuran kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 pada Triwulan I yang meliputi sasaran strategis, indikator sasaran, target serta realisasi program dan realisasi anggaran. Dan untuk selanjutnya laporan ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang wajib dibuat oleh penyelenggara negara termasuk Organisasi Pemerintah Daerah Perangkat Daerah. Penyelenggaraan SAKIP tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja triwulan I Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah sebagai

penjabaran visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan laporan kinerja triwulan I Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

- a. Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Fungsi, secara singkat fungsi dari Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa;
 2. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Politik;
 3. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekertaris; membawahi
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,

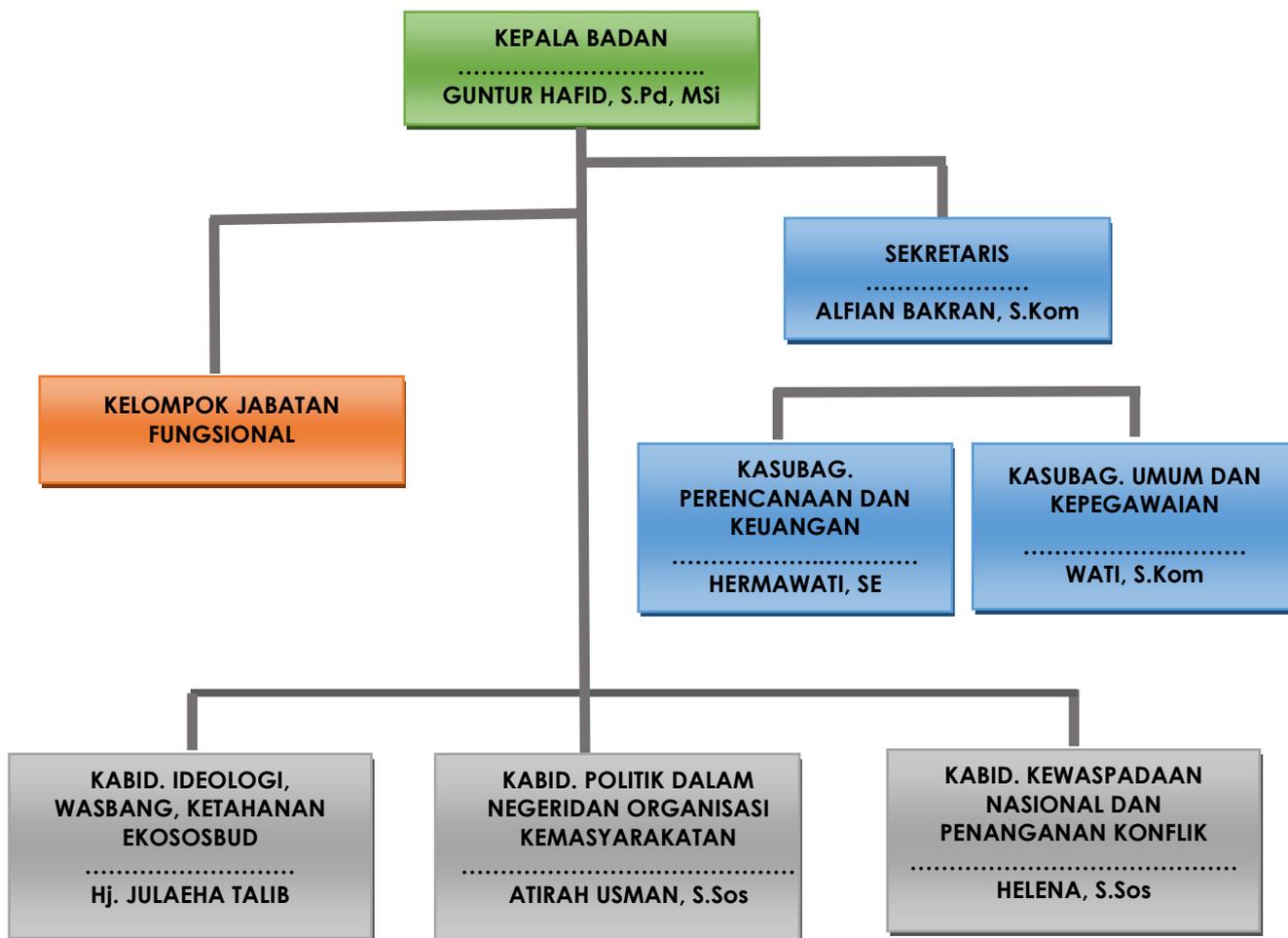
Sosial dan Budaya

- 4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
- 5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretaris, kepala sub bagian dan para Kepala Bidang sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi berikut

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Kesbangpol

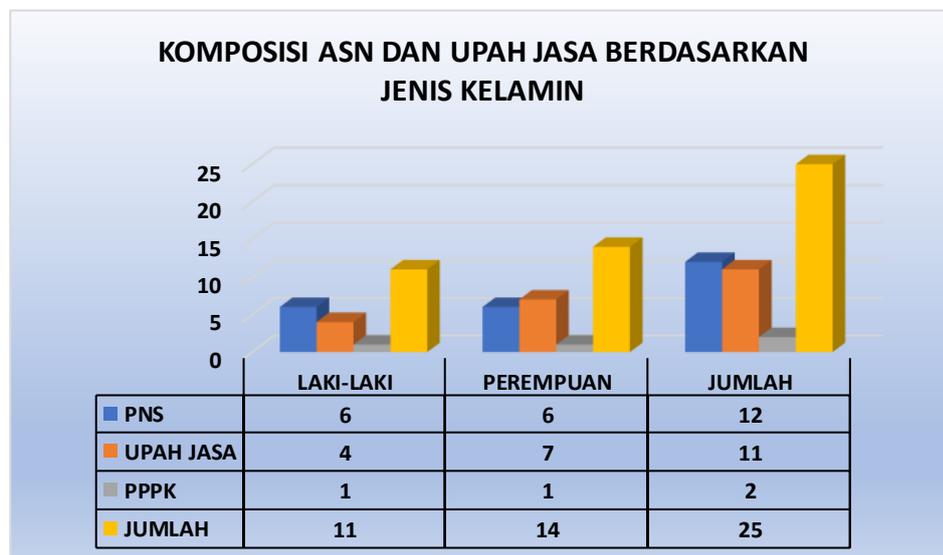


3. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada.

Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap di lingkup Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

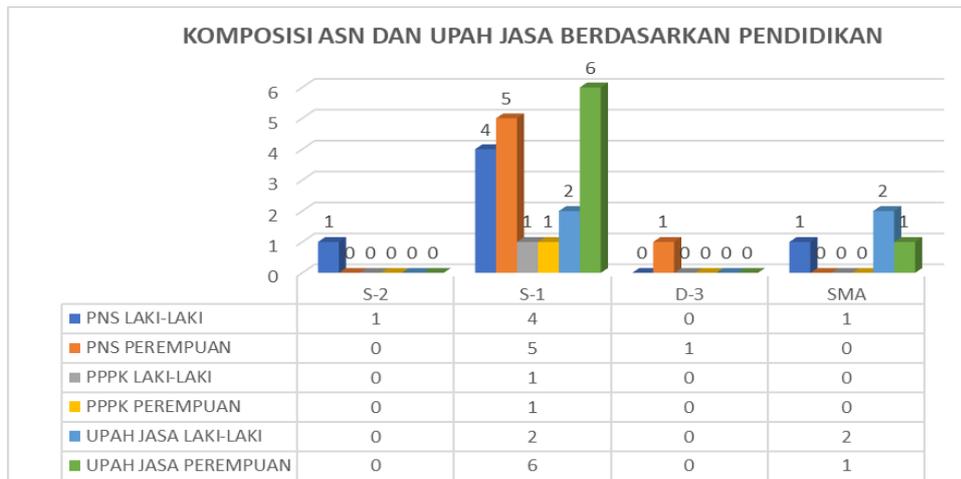
Diagram 1.1
Komposisi SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Kesbangpol

Berdasarkan diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai pada instansi Kesbangpol baik Pegawai Negeri Sipil (PNS dan PPPK) maupun Upah Jasa berdasarkan jenis kelamin berjumlah 25 orang yaitu Laki-Laki sebanyak 11 orang (44%) dan Perempuan sebanyak 14 orang (56%).

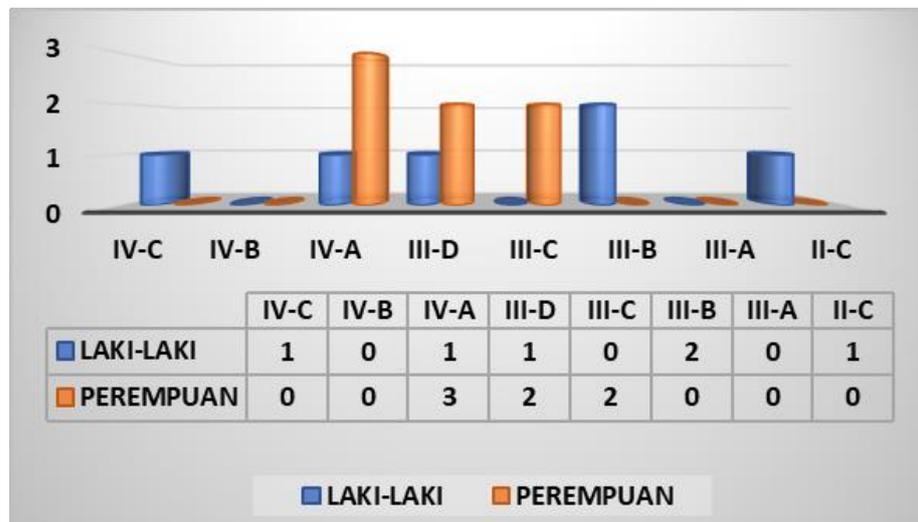
Diagram 1.2
Komposisi SDM
Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Kesbangpol

Dari diagram di atas digambarkan bahwa jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur baik PNS, PPPK maupun Upah Jasa triwulan I tahun 2024, berdasarkan jenjang pendidikan, SMA sebanyak 4 orang atau 16%, S1 sebanyak 19 orang atau 76%, dan S2 sebanyak 1 orang atau 4%.

Diagram
Komposisi pns Berdasarkan Golongan / Ruang



Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Kesbangpol

Berdasarkan diagram di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negari Sipil yang terdapat pada Kesbangpol berdasarkan golongan/ruang pada triwulan 1 tahun 2024 terdiri dari

golongan IV/c sebanyak 1 orang (8%), golongan IV/a sebanyak 4 orang (31%), golongan III/d sebanyak 2 orang (16%), golongan III/c sebanyak 2 orang (16%), golongan III/b sebanyak 2 orang (16%), dan golongan II/c sebanyak 1 orang (8%).

D. ISU-ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan teridentifikasi beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Terdapat kegiatan yang sifatnya disediakan, sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi;
2. Realisasi anggaran gaji dan tunjangan lainnya yang masih rendah daya serapnya, dikarenakan SK yang mengatur pembayaran TPP belum diterbitkan;
3. Anggaran Hibah dana kepada penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), TNI dan Polri yang belum direalisasikan dikarenakan administrasi yang belum lengkap;
4. Data dukung dari bidang yang belum maksimal;
5. Pengisian formulir evaluasi yang belum maksimal;
6. Keterlambatan PPTK dalam menyelesaikan SPJ sehingga berpengaruh terhadap capaian realisasi keuangan.

E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Review atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesbangpol.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

**LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU
BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA**

Visi ini bermakna bahwa Kabupaten Luwu Timur adalah daerah yang terus berbenah menjadi lebih maju pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan dengan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya didalamnya.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka di perlukan misi. Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 melaksanakan misi ke-5 (M5) dan ke-6 (M6) yaitu

MISI KE-5 : "MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN BAGI SELURUH WARGA MASYARAKAT"
MISI KE-6 : "MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PADA AGAMA DAN BUDAYA"

3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Tujuan dari Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur adalah : "Meningkatkan peran FKUB dalam membangun kerukunan beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya". Dengan indikator tujuan yaitu Persentase peningkatan Peran FKUB dalam membangun Kerukunan beragama serta peningkatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya

4. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu / tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Untuk itu dalam sasaran perlu dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu disertai target masing-masing. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS
1. Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan OPD

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati, kepala OPD dengan sekretaris dan kepala bidang, dan seterusnya sampai kelevel jabatan pelaksana sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	79,46%
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal	81%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai SAKIP	77,95

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Sekretaris			
I	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%
2.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3.	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%
4.	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
5.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%
6.	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100%
7.	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	Persentase barang milik daerah penunjang pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan			
1.	Meningkatnya peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%
1.1	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah	100%
1.2.1	Tersusunnya program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	4 Dokumen
1.2.2	Terlaksananya kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	20 Orang
1.2.3	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi	4 Laporan

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	
2.	Meningkatnya pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100%
2.1	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	104 unit
2.2.1	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	4 laporan
Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
I.	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100%
1.	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan	100%
1.1.	Terlaksananya koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan	100 Orang
1.2	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah paskibraka	70 Orang
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2.1.	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, social, dan budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100%
2.1.1.	Terlaksananya koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, social budaya dan budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	541 Orang
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangana Konflik			
1.	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%
1.1.	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasioanal dan penanganan konflik sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%
1.1.1.	Terlaksananya koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjas ama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjas ama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	355 orang
1.1.2.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjas ama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjas ama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	4 Laporan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Kasubag Perencanaan dan Keuangan			
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	2 Dokumen
3.	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Laporan
4.	Tersediannya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Orang/Bulan
5.	tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Dokumen
Kasubag Umum dan Kepegawaian			
1.	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan
2.	Terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	4 dokumen
3.	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang
4.	tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket
5.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	3 paket
6.	Tersedianya bahan logistik	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	4 Paket
7.	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket
8.	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Dokumen
9.	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan
10.	Terlaksananya penyelenggaraan rapat	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 laporan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	koordinasi dan konsultasi SKPD	SKPD	
11.	Tersedianya kendaraan dinas / operasional lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit
12.	Tersediannya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	34 Unit
13.	Tersedianya peralatan/mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit
14.	Tersedianya Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	2 unit
15.	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan
16.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan
17.	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan
18.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit
19.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit
20.	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
21.	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja triwulan I ini merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan penetapan kinerja yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala OPD dengan Bupati. Pengukuran kinerja disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1.	Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	79,46%
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Nasional dan Lokal	81%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Keuangan OPD	Nilai SAKIP	77,95

Sasaran 1

“ Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis “

- Analilis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini (Triwulan I)

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Sasaran I

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	PERSENTASE CAPAIAN
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	79,46%	-	-	-

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa target dan realisasi kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) triwulan I belum ditargetkan, dikarenakan kegiatan pengukuran indeks kerukunan umat beragama dilaksanakan diakhir tahun 2024 atau pada triwulan 4 tahun 2024.

2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan 1 dengan Tahun Lalu

Tabel 3.

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN – 1 : TERCIPTANYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA YANG HARMONIS				
INDIKATOR KINERJA SASARAN “INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)”	Triwulan I Tahun 2023		Triwulan I Tahun 2024	
	TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
	-	-	-	-

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target dan realisasi indeks kerukunan umat beragama tahun 2022 dan tahun 2024 pada triwulan 1 belum ditargetkan, dikarenakan kegiatan pengukuran indeks kerukunan umat beragama dilaksanakan diakhir tahun berjalan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Pada triwulan 1 tahun 2024 sasaran “terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis” dengan indikator kinerja “indeks kerukunan umat beragama (IKUB)” belum ditargetkan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Namun jika mengacu pada realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2023 yaitu 79,46% maka target jangka menengah yaitu 76,85% telah dilampaui,

Tabel 3.
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN I : TERCIPTANYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA YANG HARMONIS					
INDIKATOR KINERJA SASARAN : "INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)	TARGET TAHUN 2024 (%)	TARGET TW-1 TAHUN 2024	REALISASI TW-1 TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RENSTRA 2026 (%)
	79,46%	-	-	79,46%	76,85%

4. Perbandingan dengan Target Nasional

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Untuk perbandingan realisasi triwulan 1 dengan target nasional atau daerah lain, belum bisa dilakukan perbandingan dikarenakan untuk target dan realisasi kinerja indeks kerukunan umat beragama triwulan I Tahun 2024 belum ada, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

Namun jika mengacu pada realisasi indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 yaitu 79,46% dibandingkan dengan realisasi indeks kerukunan umat beragama Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 yaitu 76,95%. Maka indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Luwu Timur melampaui dari IKUB Propinsi Sulawesi Selatan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Beberapa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis jika mengacu pada pencapaian tahun sebelumnya dan untuk pencapaian kinerja tahun 2024 yaitu :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Luwu Timur

- terus melakukan sosialisasi aturan-aturan dan moderasi beragama di masyarakat;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi terkait untuk mensosialisasikan program-program yang berkaitan dengan kerukunan dan moderasi beragama;
 - c. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan serta menjaga kerukunan antar umat beragama dimasyarakat

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

- a. Pengetahuan masyarakat tentang regulasi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama masih kurang;
- b. Heterogenya masyarakat Kabupaten Luwu Timur, sehingga rawan terjadi gesekan sosial, yang tentunya dapat berdampak pada tingkat kerukunan dimasyarakat;
- c. Terbatasnya sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan tugas deteksi dini dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

- a. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menjaga kerukunan dan menekan gesekan-gesekan sosial serta potensi konflik yang mungkin terjadi;
- b. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan pemantauan, sosialisasi, rapat koordinasi, serta pemberdayaan forum-forum strategis yang sudah terbentuk di daerah;
- c. Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama dengan dengan

instansi-instansi terkait.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik sumber daya sarana, prasarana maupun tenaga dalam menunjang pencapaian kinerja terhadap sasaran “Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis” maka dapat difasilitasi dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan forum-forum strategis yang telah terbentuk, memaksimalkan fungsi Tim Informan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Melakukan koordinasi lintas sectoral dan memasang papan himbauan untuk tetap menjaga kerukunan dan kedamaian dimasyarakat.

Tabel 3.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target TW. I	Realisasi Tw. I	Capaian	Anggaran Tw. I	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	-	-	-	372.682.010	56.465.388	15,15%
	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	35.385.400	32.410.228	91,59%

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. I	Realisasi Tw. I	Capaian	Anggaran Tw. I	Realisasi	Capaian
	2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100%	100%	100%	41.385.460	9.665.160	23,35%
	3. Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	100%	100%	295.911.150	14.390.000	4,86

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	-	15,15%	84,84%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja indicator “*Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)*” adalah 84,84%

7. Analisis Progam/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan menjadi tatanan yang mendasari kebudayaan masyarakat serta mencerminkan kepribadian masyarakat itu sendiri.

Tujuan *Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan* adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan semangat kecintaan terhadap tanah air.

Sasaran program adalah meningkatnya penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator program yaitu Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan. Target kinerja 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

Formula indikatornya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan (Tw-n)}}{\text{Jumlah Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diamanahkan (Tw-n)}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Adapun capaian program tersebut berasal dari kebijakan-kebijakan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diamanahkan dan dilaksanakan pada triwulan 1 yaitu Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Kebijakan ini telah di implementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social dan budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut

1.1. Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Luwu Timur terhadap Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara.

Dengan indicator kinerja yaitu “Persentase capaian pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan.

Adapun formulasi yang digunakan adalah

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai Wasbang yang dilaksanakan (Tw-n)}}{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai Wawasan Kebangsaan yang direncanakan (Tw-n)}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada triwulan I, ditargetkan 100% dan terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Capaian tersebut diperoleh dari implementasi kebijakan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan. Adapun kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan ditriwulan 1 ditahun 2024 yaitu terlaksananya kegiatan pembentukan pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2024.

Kegiatan pembentukan paskibraka tahun 2024 diawali dengan rapat koordinasi tim dan sosialisasi pengenalan aplikasi berbasis online kepada para siswa SMA/Sederajat se Kabupaten Luwu Timur.

Dan pada triwulan 1 ini juga telah dilaksanakan tahapan seleksi pembentukan pasukan pengibar bendera pusaka

yang meliputi seleksi administrasi, seleksi akademik dan seleksi Kesehatan.

Dokumentasi kegiatan Tahapan Seleksi Paskibraka



Dokumentasi : Rapat Koordinasi Tim Pembentukan Paskibraka 2024



Dokumentasi : Sosialisasi Pendaftaran Calon Paskibraka 2024 di Sekolah-Sekolah



Dokumentasi : Seleksi Akademik (TIU dan TWK) Ca-Paskib 2024



1.1.1. Sub kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan. Karakter kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan

Sasaran kinerja sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan , bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan target kinerja pada triwulan 2.

Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	-
2.	Realisasi	-
3.	Capaian	-

1.1.2. Sub kegiatan : Pembentukan Paskibraka

Sasaran kinerja sub kegiatan ini adalah terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka. Dengan indicator kinerja yaitu jumlah paskibraka (orang).

Berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan target kinerja pada triwulan 3. Pada triwulan 1 ini telah dilakukan tahapan-tahapan seleksi paskibraka yaitu seleksi administrasi, seleksi akademik dan seleksi Kesehatan.

Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah paskibraka (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	-
2.	Realisasi	-
3.	Capaian	-

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sasaran kinerja program yaitu meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya. Dengan indikator persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya. Target kinerja 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

Formula indikatornya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan} \\ & \text{budaya yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pembinaan dan pengembangan} \\ & \text{ketahanan ekonomi, social dan budaya yang direncanakan (tw-n)} \\ & \qquad \qquad \qquad \times 100\% \\ = & 3/3 \times 100\% \\ = & 100\% \end{aligned}$$

Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya yang direncanakan di triwulan 1 tahun 2024 yaitu :

- a. Fasilitasi kerukunan umat beragama;
- b. Fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba;
- c. Koordinasi dan monitoring ketahanan ekonomi, social dan budaya

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut

2.1. Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, social dan budaya

Indicator kegiatan yaitu Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya. Target kinerja yaitu 100%, terealisasi 100% atau capaian kinerja 100%.

Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya yang dilaksanakan pada triwulan 1 yaitu:

1. Terlaksananya fasilitasi kerukunan umat beragama;
2. Terlaksananya fasilitasi Pencegahan dan penyalahgunaan narkotika;
3. Terlaksananya koordinasi dan monitoring ketahanan ekonomi, social dan budaya

Adapun formulasi kegiatan yaitu :

jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya yang direncanakan (Tw-n) x 100%

$$= 3/3 \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dokumentasi kegiatan



Dokumentasi : Penandatanganan NPHD Bantuan Hibah Dana FKUB Tahun 2024



Dokumentasi : Rapat Koordinasi FKUB



Dokumentasi : Pemantauan Harga / Ketahanan Ekonomi



Dokumentasi : Pemantauan Pawai Ogoh-Ogoh di Tomoni Timur / Ketahanan Budaya

2.1.1. Sub kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

Indicator sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.

Berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan, pada triwulan 1 tahun 2024 ditargetkan 41 orang yang mengikuti rapat koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial an budaya. Terealisasi 41 orang atau capaian 100%, yaitu kegiatan rapat koordinasi FKUB.

Sub kegiatan ini diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	41 orang
2.	Realisasi	41 orang
3.	Capaian	100%

3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerja program adalah Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Pada triwulan 1 ditargetkan 100%, dan terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

Pencapaian indikator program ini diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Jumlah kejadian dan konflik yang ditangani (Tw-n) dibagi jumlah kejadian dan konflik yang terdata (Tw-n) x 100%
 = 24/24 X 100%
 = 100%

Berikut data kejadian dan konflik yang terdata dan tertangani pada periode bulan Januari sampai dengan Maret 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.

Data Kejadian dan Konflik
 Periode Januari – Maret 2024

No	Jenis Kejadian	Tanggal	Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian	Kerugian			Tidak lanjut/ Solusi
						Material	Korban Jiwa	Korban Luka	
1	Unjuk rasa (Demo)	04 Januari 2024	Tarengge	Wotu	Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Pemuda Luwu Timur mendukung langkah Pemerintah RI dalam membubarkan Ormas Radikal	-	-	-	Telah dimediasi oleh Pemerintah setempat
2	Lakalantas	07 Januari 2024	Tokalimbo	Mangkutana	Kecelakaan sebuah mobil Open Cup terjun kejurang yang tingginya diperkirakan 5 meter	Bagian depan rusak	-	1 Orang	Sudah ditangani Pemerintah setempat
3	Kebakaran	08 Januari 2024	Tawakua	Angkona	Kebakaran rumah di Desa Tawakua Kecamatan Angkona diakibatkan korsleting listrik	Sekitar 100.000.000	-	-	Telah ditangani pemerintah setempat
4	Penyerobotan lahan	10 Januari 2024	Kasintuwu	Mangkutana	Adanya dugaan penyerobotan lahan di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu	-	-	-	Telah ditangani Pemerintah setempat dan daerah
5	Pencemaran nama baik	15 Januari 2024	Loeha	Towuti	Terjadi dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Hj.Salemma terhadap Heru dan dilaporkan ke Polsek Towuti	-	-	-	Diselesaikan secara kekeluargaan
6	Aksi Protes	15 Januari 2024	Maleku	Mangkutana	Aksi protes terhadap Kepala Desa dengan memasang spanduk disekitar kantor Desa	-	-	-	Sudah ditangani pemerintah setempat dan telah dilakukan mediasi

No	Jenis Kejadian	Tanggal	Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian	Kerugian			Tidak Lanjut/ Solusi
						Material	Korban Jiwa	Korban Luka	
7	Bencana Alam	15 Januari	Cendana Hitam	Tomoni Timur	Saluran air yang tertutup sehingga mengakibatkan banjir	-	-	-	Telah dilakukan gotong royong oleh masyarakat setempat
8	Sengketa lahan	20 Januari 2024	Loeha	Towuti	Terjadi sengketa lahan di Dusun Kuerre Sumanga'	-	-	-	Ditangani pihak berwajib
9	Konflik Perbatasan Wilayah	20 Januari 2024	Kasintuwul	Mangkutana	Konflik diperbatasan wilayah Dusun Sampuraga antara warga setempat dan Warga Sulawesi Tengah	-	-	-	Sudah ditangani pemerintah setempat dan Pihak berwajib
10	Pemerkosaan	22 Januari 2024	Loeha	Towuti	Terjadi dugaan pemerkosaan terhadap seorang warga	-	-	-	Telah ditangani pihak Polsek Towuti
11	Pencurian	01 Februari 2024	Dusun Hasanuddin	Towuti	Telah terjadi pencurian aki/Accu Mobil	1 buah	-	-	Telah ditangani pihak Kepolisian
12	Aksi Penolakan	02 Februari 2024	Tomoni	Tomoni	Aksi penolakan oleh penjual pasar subuh diterminal Kuwarasan untuk direlokasikan kepasar tarengge	-	-	-	Telah dilakukan mediasi oleh Pemerintah Daerah
13	Unjuk rasa (Demo)	06 Februari 2024	Maleku	Mangkutana	Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Pemuda dan Masyarakat Maleku (APDMM)	-	-	-	Telah dilakukan mediasi oleh Pemerintah Daerah
14	Aksi protes	13 Februari 2024	Bawalipu	Wotu	Aksi protes salah satu Caleg DPRD Kabupaten Luwu Timur	-	-	-	Telah ditangani pihak Kepolisian
15	Perkelahian	18 Februari 2024	Dusun Koromali	Towuti	Telah terjadi perkelahian antar warga	-	-	-	Damai secara kekeluargaan
16	Unjuk rasa (Demo)	21 Februari 2024	Malili	Malili	Aksi unjuk rasa terkait kekerasan Disabilitas	-	-	-	Telah dilakukan mediasi oleh pihak Kepolisian
17	Dugaan penggelembungan Suara	21 Februari 2024	Tabarano	Wasuponda	Dugaan penggelembungan suara dan pengrusakan surat suara	-	-	-	Telah ditangani oleh KPU dan Bawaslu
18	Bencana Alam	22 Februari 2024	Parumpanai	Wasuponda	Bencana banjir akibat luapan air sungai Rende-rende	1Sekolah	-	-	Telah dilaporkan pada BPBD

No	Jenis Kejadian	Tanggal	Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian	Kerugian			Tidak lanjut/ Solusi
						Material	Korban Jiwa	Korban Luka	
19	Bencana Alam	23 Februari 2024	Matompi	Towuti	Bencana banjir sepanjang jalan poros akibat curah hujan yang deras	-	-	-	Telah dilakukan penyisiran oleh Polsek Towuti dan Pemerintah setempat
20	Perkelahian	24 Februari 2024	Tokalimbo	Towuti	Telah terjadi perkelahian antara 2 warga Desa Bantilang menggunakan senjata tajam (parang)	-	-	1 Orang	Telah ditangani Polsek Towuti
21	Kesalahpahaman	24 Februari 2024	Cencana Hitam	Tomoni Timur	Telah terjadi kesalahpahaman terkait jam malam dalam bermusik yang hampir mengakibatkan perkelahian	-	-	-	Telah dilakukan mediasi dan berdamai
22	Unjuk Rasa (Demo)	14 Maret 2024	Harapan	Malili	Aksi unjuk rasa oleh Gabungan Kontraktor Lokal	-	-	-	Telah dilakukan mediasi antara PT.CLM dengan Kontraktor Lokal
23	Unjuk Rasa (Demo)	20 Maret 2024	Harapan	Malili	Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Pemuda Pemerhati Lingkungan	-	-	-	Telah dilakukan mediasi antara PT.CLM dengan para pengunjuk rasa
24	Unjuk Rasa (Demo)	25 Maret 2024	Puncak Indah	Malili	Aksi unjuk rasa oleh LSM-ASPIRA didepan Pengadilan Negeri Malili	-	-	-	Telah dilakukan mediasi

3.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Indikator kegiatan yaitu Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social. Dengan target kinerja 100%, terealisasi 100% atau capaian 100%. Adapun kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dilaksanakan di triwulan 1 yaitu:

1. Terlaksananya Koordinasi dengan Forum Pimpinan Daerah (FORKIPIMDA);

- 2. Terlaksananya pemantauan kondisi keamanan dan ketertiban dilingkungan Masyarakat;
- 3. Terlaksananya rapat evaluasi tim informan.

Adapun formulasi kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan} \\ & \text{konflik social yang dilaksanakan (Tw-n) dibagi Jumlah kegiatan} \\ & \text{pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social} \\ & \text{yang direncanakan (Tw-n) x 100\%} \\ & = 3 / 3 \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Dokumentasi Kegiatan



Dokumentasi : Rakor Forkopimda



Dokumentasi : Rapat Evaluasi Tim Informan



Dokumentasi : Pemantauan Demonstrasi

3.1.1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah. Pada triwulan 1 ditargetkan 115 orang yang mengikuti rapat koordinasi dan terealisasi 115 orang atau capaian 100%.

Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	115 Orang
2.	Realisasi	115 Orang
3.	Capaian	100%

3.1.2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sasaran sub kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah. Ditargetkan 1 laporan dan terealisasi 1 laporan hasil

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, dengan capaian kinerja 100%.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan, pengawasan terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap stabilitas daerah dan nasional.

Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan
3.	Capaian	100%

Sasaran 2

“ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum “

Sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Politik Masyarakat dengan indicator sasaran yaitu tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Local. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara atau daerah, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah.

Untuk itu, penyelenggaraan pemilu nasional dan local sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

❖ Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini (Triwulan I)

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Umum” ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal”. Realisasi dan capaian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.

Capaian Indikator Sasaran II

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	PERSENTASE CAPAIAN
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Nasional dan Lokal	81%	81%	82,39%	101,71%

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja triwulan I sebesar 82,39% dan melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 81% dengan capaian kinerja 101,71%. Realisasi sebesar 82,39% merupakan data numerik KPU Kabupaten Luwu Timur berdasarkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak (Pilpres dan Pileg) Bulan Februari Tahun 2024.

Pencapaian positif indikator sasaran Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal tersebut diperoleh dari formulasi :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Suara dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap} \times 100\% \\ & = 179,883 \text{ suara} / 218,322 \text{ DPT} \times 100\% \\ & = 82,39\% \end{aligned}$$

Data partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak
(PILEG dan PILPRES) Tahun 2024

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	TOTAL (SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH)	PERSENTASE (%)
1	Burau	25.316	20.478	240	20.718	81.84
2	Wotu	24.116	19.953	333	20.286	84.12
3	Tomoni	19.318	15.941	306	16.247	84.10
4	Tom-Tim	10.217	8.404.	92	8.496	83.16
5	Mangkutana	16.392	12.930	164	13.094	79.88
6	Kalaena	9.125	7.385	78	7.463	81.79
7	Angkona	18.244	14.919	311	15.230	83.48
8	Malili	30.587	24.910	366	25.276	82.64
9	Wasuponda	15.793	12.453	102	12.555	79.50
10	Towuti	31.968	26.879	313	27.192	85.06
11	Nuha	17.246	13.237	89	13.326	77.27
Total		218.322	177.489	2.394	179.883	82,39

Sumber : Bid. Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol dan KPU Kab. Luwu Timur

2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan 1 dengan Tahun Lalu

Tabel 3.

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi	
			Tw.I 2023	Tw.I 2024	Tw.I 2023	Tw.I 2024
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan local	80,46%	81%	80,46%	82,39%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi kinerja sasaran strategis meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pemilihan umum dengan indicator kinerja Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan local triwulan 1 tahun 2023

mencapai target yang ditetapkan hal ini dikarenakan data realisasi yang digunakan pada tahun 2023 masih menggunakan data numerik KPU Kabupaten Luwu Timur pada penyelenggaraan PILKADA Tahun 2020.

Sedangkan realisasi triwulan 1 tahun 2024 melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 82,39% dari target 81% atau capaian kinerja 101,71%. Hasil realisasi kinerja tahun 2024 mengacu pada data penyelenggaraan PEMILU SERENTAK bulan Februari Tahun 2024.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Pada Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan local sampai dengan akhir RPJMD ditargetkan 81,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi TW.1 Tahun 2024 yaitu 82,39%, telah melampaui dari target jangka menengah yang ditetapkan.

Adapun perbandingan antara target dan capaian triwulan I dengan target dan jangka menengah pada Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.

Perbandinagn Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran 2:	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum
Indikator	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Nasional dan Lokal
Target 2024	81%
Realisasi Tw.I	82,39%
Capaian Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024	101,71%
Target Akhir Renstra (2026)	81,00%

4. Perbandingan dengan Target Nasional

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan standar nasional atau realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Secara nasional target kinerja untuk capaian tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan umum serentak (PILEG dan PILPRES) adalah 79,50%. Berdasarkan data numerik dari KPU Kabupaten Luwu Timur capaian partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya melampaui dari target nasional yang ditetapkan yaitu 82,39%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Beberapa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal yaitu :

- a. Menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait maupun partai politik dalam melaksanakan Pendidikan politik dimasyarakat;
- b. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki;
- c. Memaksimalkan jumlah personil yang ada dalam pembagian wilayah pemantauan dan pelaksanaan kegiatan

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Pendidikan politik;
- b. Minimnya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Ormas, LSM dan OKP serta kegiatan Pendidikan politik kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan tugas pemantauan situasi politik dimasyarakat

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

- a. Meningkatkan jalinan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya;
- b. Melakukan sosialisasi yang masif, terkait Pendidikan politik dimasyarakat;
- c. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik sumber daya sarana, prasarana maupun tenaga dalam menunjang pencapaian kinerja terhadap sasaran “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum” maka dapat difasilitasi dengan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan dengan instansi terkait dan partai-partai politik untuk melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik dimasyarakat.

Tabel 3.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program/	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Tw. I	Realisasi Tw. I	Capaian	Anggaran I Tw.	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum		Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Nasional dan Lokal	81%	82,39%	101,71%	29.878.624.630	49.562.500	0,16%
	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	0%	0%	0%	29.861.627.630	48.562.500	0,16
	2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	25%	16,35%	65,40%	17.000.000	1.000.000	5,88%

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Nasional dan Lokal	82,39%	0,16%	99,84%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisensi anggaran terhadap pencapaian kinerja indicator “*Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Nasional dan Lokal* ” adalah 99,18%

7. Analisis Progam/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Sasaran kinerja program yaitu Meningkatnya peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Indikator program yaitu Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Pada triwulan 1 capaian kinerja program ini belum ditargetkan.

Formula indikatornya adalah sebagai berikut :

Jumlah Partai Politik yg memenuhi syarat pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik dibagi Jumlah Partai Politik yang menerima bantuan Keuangan Partai Politik X 100%

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut

1.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya pemahaman masyarakat Kabupaten Luwu Timur akan pentingnya pendidikan politik dimasyarakat.

Dengan indicator kinerja yaitu Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah. Ditargetkan 100% dan terealisasi 100% atau capaian kinerja 100%. Adapun yang menjadi target kinerja ditriwulan 1 yaitu terlaksananya pemantauan situasi politik daerah menjelang penyelenggaraan PEMILU SERENTAK maupun pasca penyelenggaraan Pemilu,

Adapun formulasi yang digunakan adalah

$$\begin{aligned} & \text{Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan dibidang Pendidikan} \\ & \text{politik etika budaya politik, serta pemantauan situasi} \\ & \text{politik daerah (Tw-n) x 100\%} \\ & = 200\% / 2 \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Dokumentasi Kegiatan di Bidang Politik



Dokumentasi : Pemantauan Situasi Politik Pemilu

1.1.1. Sub kegiatan : Penyusunan program kerja dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik

Sasaran kinerja sub kegiatan yaitu tersusunnya program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,

serta pemantauan situasi politik di daerah. Pada triwulan 1 ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi. Dengan capaian kinerja 100%. Adapun formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah :

Jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun tepat waktu (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan
3.	Capaian	100%

1.1.2. Sub kegiatan : Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Pada triwulan 1 belum ditargetkan.

Adapun formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah :

Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	-
2.	Realisasi	-
3.	Capaian	-

1.1.3. Sub kegiatan : Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Target yang ditetapkan pada triwulan 1 adalah 1 (satu) laporan dan terealisasi sebesar 1 Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik dengan capaian kinerja 100%.. Sub kegiatan ini diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun tepat waktu (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan
3.	Capaian	100%

Kegiatan ini adalah melakukan pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk mengetahui perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan di daerah. Dalam hal ini pelaksanaan evaluasi perkembangan politik di daerah dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemantauan secara langsung di lapangan terhadap isu-isu atau kerawanan politik yang mengarah pada persaingan tidak sehat dan menimbulkan perselisihan. Berikut data pemantauan situasi politik di daerah

Tabel 3.

Data Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No	Kecamatan	Penjelasan
1.	Nuha	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
2.	Towuti	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
3.	Wasuponda	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
4.	Malili	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
5.	Angkona	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
6.	Kalaena	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
7.	Mangkutana	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
8.	Tomoni	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
9.	Tomoni Timur	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
10.	Wotu	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
11.	Burau	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri

2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Sasaran program yaitu meningkatnya pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat. Dengan indikator kinerja program yaitu Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi. Ditriwulan 1 ditargetkan sebanyak 25% atau 26 ormas dari target tahunan yaitu 104 ormas. Adapun realisasi sebanyak 17 ormas atau 16,34% dengan capaian kinerja 65,38%. Target kinerja program tidak mencapai target dikarenakan Sebagian besar ormas/LSM/Kelompok Tani dan Nelayan/Rumah Ibadah/Lembaga Pendidikan yang mengajukan dokumen permohonannya belum lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak dapat dilakukan proses lebih lanjut.

Formulasi untuk mengukur capaian kinerja program ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Ormas yang diberdayakan dan diawasi}}{\text{jumlah ormas yang ditargetkan (n)}} \times 100\%$$

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

2.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Sasaran kegiatan yaitu terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat. Adapun target ormas yang diawasi dan diberdayakan pada triwulan 1 yaitu sebanyak 26 unit ormas/LSM/Rumah Ibadah/Kelompok Tani dan Kelompok Nelayan, terealisasi 17 Ormas/LSM/Rumah Ibadah/Kelompok Tani dan Kelompok Nelayan atau capaian 65,38%

Adapun formulasi kegiatan yaitu :

$$\text{Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi (n)}$$

Tabel 3.

Data Ormas/Kelompok Tani/Kelompok Nelayan/Rumah Ibadah

No	Nama Organisasi	Alamat
1	Masjid Nurul Ummal	Jl. Jenderal Sudirman Ds. Balantang Kec. Malili
2	Masjid Nurul Iman	Jl. Poros Malili Wotu Ds. Ussu Kec. Malili
3	Masjid Ar - Rahman	Dsn. Suluminaga Ds. Lakawali Pantai Kec. Malili
4	Masjid Rahmatullah	Dsn. Cerekang Ds. Manurung Kec. Malili
5	Gereja Pouk Malili	Jl. Pongtiku Ds. Puncak Indah Kec. Malili
6	Pura Jagat Kertiyasa Lakawali	Ds. Londoe Ds. Lakawali Kec. Malili
7	Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tenang	Ds. Wewangriu Kec. Malili
8	Kelompok Pembudidaya Ikan Burung Laut	Jl. Pinrang Ds. Wewangriu Kec. Malili
9	Kelompok Pembudidaya Ikan Bangau Putih	Ds. Wewangriu Kec. Malili
10	Kelompok Pembudidaya Ikan Gracilaria Mandiri	Ds. Wewangriu Kec. Malili
11	Kelompok Pembudidaya Ikan Tabusiri Jaya	Ds. Wewangriu Kec. Malili
12	Gereja Bethel Indonesia Jemaat Urako	Jl. Dongi Ds. Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
13	Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Luwu Timur	Jl. Pahlawan Dsn. Campae Ds. Arolipu Kec. Wotu
14	Masjid Al-Muhajirin	Jl. Poros Mulyasri Ds. Mulyasri Kec. Tomoni
15	Gereja Sidang Jemaat Kristus Tawibaru	Ds. Pancakarsa Kec. Mangkutana
16	Masjid Al Fatimah Aslam	Jl. Poros Patengko Dsn. Harapan Mandiri Ds. Patengko Kec. Tomoni Timur
17	Gereja Kibaid Jemaat Ujung Batu	Jl. Latiba Dsn. Ujung Batu Ds. Watang Panua Kec. Angkona

Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Ormas/LSM/Klp Tani/Rumah Ibadah



2.1.1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah

Sasaran Sub kegiatan yaitu terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. Pada triwulan 1 ditargetkan 1 laporan dan terealisasi 1 laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, dan evaluasi. Dengan capaian kinerja 100%

Formula mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas yang disusun tepat waktu (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan
3.	Capaian	100%

Sasaran 3**“ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan “**

➤ Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan OPD merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di setiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SPKD adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas pelayanan SKPD ini ditetapkan indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini (Triwulan 1)

Tabel 3.

Capaian Indikator Sasaran III

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I	PERSENTASE CAPAIAN
Nilai Sakip	77,95	0	0	0

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator nilai SAKIP, target triwulan 1 belum ditargetkan, dikarenakan untuk capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur tahun (n-1).

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selanjutnya, perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2019–2023

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	KATEGORI	CAPAIAN KINERJA
Nilai Sakip	Nilai	2019	70	70,9	BB	101,28
		2020	70	62,18	B	86,8
		2021	72	66,76	B	92,72
		2022	67	70,23	BB	104,82
		2023	69	77,95	BB	112,97
		2024	77,95	Belum ada	-	-

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Mengacu pada realisasi tahun 2023 yaitu 77,95 , jika dibandingkan dengan target jangka menengah sampai tahun 2026, telah melampau dari target jangka menengah. Adapun perbandingan antara target dan capaian tahun 2024 dengan target dan kinerja jangka menengah pada Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026 sebagai berikut

Tabel 3.

Perbandinagn Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target
Jangka Menengah

Sasaran III:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Indikator	Nilai SAKIP
Realisasi 2023	77,95
Target Akhir Renstra 2026	72
Capaian Sampai dengan Tahun 2024	Belum Rilis

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional atau Daerah Lain

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain. Perbandingan antara tingkat capaian Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur dengan daerah lain dalam pencapaian Indikator Strategis di Tahun 2023, dimana Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan nilai 64,91 dengan Predikat B, sementara Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 77,95 dengan Predikat BB. Nilai SAKIP antara Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur dan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat terdapat selisih nilai sebesar 13.04, Namun Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur masih harus semakin meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai SAKIP-nya dimasa yang akan datang.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Secara keseluruhan dari tahun ke tahun capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur terhadap sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD menunjukkan predikat baik, hal ini disebabkan beberapa factor :

1. Badan Kesbangpol telah memiliki Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah periode 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan target jangka menengah;
2. Telah disusun RKT, Perjanjian dan Rencana Aksi dan telah selaras dengan Renstra;
3. Pemberdayaan SDM / Aparatur yang cukup maksimal sehingga mendukung kelancaran operasional kantor.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Kurangnya SDM/Aparatur yang kompeten dibidangnya;
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional.
3. Belum optimalnya penyusunan perjanjian kinerja sampai ke tingkat staf/pelaksana
4. Monitoring dan evaluasi atas perjanjian kinerja yang belum berjalan dengan baik

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur diantaranya:

1. Menyelaraskan semua dokumen perencanaan sampai tingkat bawah dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja seperti perjanjian kinerja sampai jenjang staf dan menyusun indikator kinerja;
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan atau triwulan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan rapat internal. Dengan adanya rapat ini maka dapat dilakukan pencegahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya;
 3. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
 4. Mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan asistensi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan memaksimalkan tugas-tugas pokok dan fungsi disetiap bidang dan pada level kasubag. Begitupun dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada khususnya staf-staf atau jabatan pelaksana pada setiap

bidang dengan memaksimalkan tenaga upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas ASN.

- Memaksimalkan peralatan dan perlengkapan kantor yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN

Tabel 3.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target TW. I	Realisasi Tw. I	Capaian	Anggaran Tw. I	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Nilai Sakip	0	0	0	1.218.831.959	307.781.162	25,25%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	100%	81.76%	81.76%	1.218.831.959	307.781.162	25,25%

Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program	Indikator	% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Tingkat efisiensi Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	75,72%	25,25%	74,75%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa efisensi anggaran terhadap pencapaian kinerja Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang merupakan program penunjang/pendukung dari pencapaian Sasaran *Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD* adalah 74.75%

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pada triwulan 1 terdiri dari 1 (satu) program, 8 (delapan) Kegiatan dan 26 (dua puluh Enam) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota

Sasaran program yaitu meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai. Indikator program adalah Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

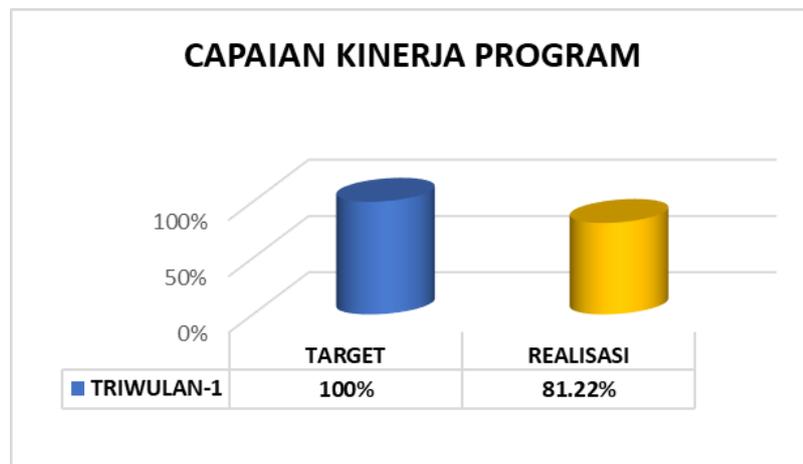
Target yang ditetapkan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada triwulan 1 Tahun 2024 adalah yaitu 100% terealisasi sebesar 81.76% dengan capaian kinerja 81.76%. Capaian kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

Formulasi mengukur capaian program :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah keseluruhan capaian kinerja kegiatan dibagi} \\ & \text{jumlah seluruh kegiatan} \times 100\% \\ & = 649.75\% / 8 \times 100\% \\ & = 81.22\% \end{aligned}$$

Program ini didukung 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan sebagai berikut :

Grafik Kinerja



1.2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu.

Berdasarkan rencana aksi tahun 2024, target kinerja triwulan 1 yaitu 100% (4 dokumen) dan terealisasi 100% (4 dokumen) atau capaian kinerja 100%. Adapun dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun yaitu laporan kinerja Tahun 2023; LKPJ dan LPPD Tahun 2023; Laporan Kinerja Triwulan 4 Tahun 2023; Laporan Evaluasi RKPD Tw-4 Tahun 2023.

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut

$$\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu} \div \text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi} \times 100\% \text{ (Tw-n)}$$

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	100%
2.	Realisasi	100%
3.	Capaian	100%

Kegiatan ini didukung 3 sub kegiatan, yaitu :

1.2.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sasaran kinerja sub kegiatan yaitu tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah. Pada triwulan 1 target kinerja belum ditargetkan, namun proses penyusunan rancangan awal (ranwal tahun) rencana kerja tahun 2025 telah dimulai.

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu :

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	-
2.	Realisasi	-
3.	Capaian	-

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sasaran kinerja sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD. Pada triwulan 1 target kinerja belum ditargetkan, namun tahapan penyusunan anggaran dalam rencana kerja tahun 2025 telah dimulai.

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu :

Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	-
2.	Realisasi	-
3.	Capaian	-

1.2.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran kinerja sub kegiatan yaitu terlaksananya evaluasi kinerja perangkat. Pada triwulan 1 ditargetkan 4 laporan evaluasi kinerja perangkat daerah, terealisasi 4 dokumen dengan capaian kinerja 100%.

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu :

Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	4 Laporan
2.	Realisasi	4 Laporan
3.	Capaian	100%

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan perangkat daerah. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan adalah Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik. Pada triwulan 1, terealisasi 100% dari target 100%. Capaian kinerja 100%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah dokumen laporan keuangan yang diterbitkan dibagi Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun X 100% (Tw-n)

$$= 5 \text{ Dokumen} / 5 \text{ Dokumen} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	100%
2.	Realisasi	100%
3.	Capaian	100%

Pencapaian kinerja ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran sub kegiatan yaitu tersediannya gaji dan tunjangan ASN. Pada triwulan 1 ditargetkan 14 orang/bulan ASN yang menerima gaji dan tunjangan, terealisasi 14 orang ASN. Capaian kinerja 100%.

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu :

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	14 Orang/Bulan
2.	Realisasi	14 Orang / Bulan
3.	Capaian	100%

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.

Pada triwulan 1 ditargetkan 5 dokumen dan terealisasi 5 dokumen atau capaian kinerja 100%. Adapun dokumen tersebut yaitu dokumen catatan atas laporan keuangan tahun 2023; dokumen laporan keuangan bulanan; dan dokumen laporan keuangan triwulan.

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu :

Jumlah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	5 Dokumen
2.	Realisasi	5 Dokumen
3.	Capaian	100%

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya administrasi dan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar. Pada triwulan 1 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% atau capaian kinerja 100%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada} \\ & \text{SKPD yang disusun dibagi Jumlah dokumen laporan penatausahaan} \\ & \text{barang milik daerah pada SKPD} \times 100\% \quad (\text{Tw-n}) \\ & = 1 \text{ Laporan} / 1 \text{ Laporan} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	100%
2.	Realisasi	100%
3.	Capaian	100%

Pencapaian kinerja kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD. Ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau capaian 100% yakni Laporan penatausahaan barang milik daerah triwulan 1.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD} \\ & \text{yang disusun tepat waktu(Tw-n)} \end{aligned}$$

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan
3.	Capaian	100%

1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan adalah Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Terealisasi 75% rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah dari target 100%. Capaian kinerja 75%. Hal ini dikarenakan adanya sub kegiatan pada yang capaian kinerjanya hanya 50%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dibagi jumlah seluruh sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah X 100% (Tw-n)

$$= 150\% / 2 \times 100\%$$

$$= 75\%$$

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	100%
2.	Realisasi	75%
3.	Capaian	75%

Pencapaian kinerja kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1.4.1. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Ditarget 1

dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau capaian 100%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu(Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan
3.	Capaian	100%

1.4.2. Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Dengan target triwulan 1 sebanyak 2 orang dan terealisasi 1 orang atau capaian kinerja 50%. Hal ini dikarenakan kegiatan bimtek diikuti apabila ada persuratan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	2 Orang
2.	Realisasi	1 Orang
3.	Capaian	50%

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya administrasi umum perangkat daerah. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan adalah Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Terealisasi 95% dari target 100%. Capaian kinerja 95%. Hal

ini dikarenakan adanya sub kegiatan pada yang capaian kinerjanya hanya 66%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan} \\ & \text{administrasi umum perangkat daerah dibagi jumlah seluruh sub} \\ & \text{kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah} \\ & \qquad \qquad \qquad \times 100\% \text{ (Tw-n)} \\ & = 666 / 7 \times 100\% \\ & = 95\% \end{aligned}$$

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	100%
2.	Realisasi	95%
3.	Capaian	95%

Pencapaian kinerja kegiatan ini didukung oleh 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran sub kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor. Ditargetkan 1 paket dan terealisasi 1 paket komponen instalasi Listrik yang meliputi bohlam, kabel, fitting, stop kontak, dan lampu sorot. Dengan capaian kinerja 100%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

$$\begin{aligned} & \text{jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan} \\ & \text{kantor yang disediakan (Tw-n)} \end{aligned}$$

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Paket
2.	Realisasi	1 Paket
3.	Capaian	100%

1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran sub kegiatan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Ditargetkan 3 paket dan terealisasi 2 paket peralatan dan perlengkapan kantor yaitu 1 unit laptop dan 1 unit printer, sedangkan untuk belanja homeuse (gorden kantor) belum diadakan dikarenakan harga yang tertera dalam e-catalog lebih tinggi dari pada harga DPA. Dengan capaian kinerja 66%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
(Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	3 Paket
2.	Realisasi	2 Paket
3.	Capaian	66%

1.5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran sub kegiatan yaitu Tersedianya bahan logistic. Ditargetkan 1 paket dan terealisasi 1 paket bahan logistic yang meliputi alat kebersihan dan bahan pembersih kantor. Dengan capaian kinerja 100%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Paket
2.	Realisasi	1 Paket
3.	Capaian	100%

1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya barang cetak dan penggandaan. Ditargetkan 1 paket dan terealisasi 1

paket barang cetak dan penggandaan. Dengan capaian kinerja 100%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
(Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Paket
2.	Realisasi	1 Paket
3.	Capaian	100%

1.5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran sub kegiatan yaitu tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Ditargetkan 15 dokumen, terealisasi 15 dokumen bahan bacaan koran nasional, regional dan local. Dengan capaian kinerja 100%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	15 Dokumen
2.	Realisasi	15 Dokumen
3.	Capaian	100%

1.5.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu. Ditargetkan 1 laporan, dan terealisasi 1 laporan fasilitasi kunjungan tamu. Dengan capaian kinerja 100%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah :

Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan
3.	Capaian	100%

1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Ditargetkan 3 laporan, terealisasi 3 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Dengan capaian kinerja 100%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

$$\frac{\text{Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Tw-n)}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	3 Laporan
2.	Realisasi	3 Laporan
3.	Capaian	100%

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja yaitu Persentase BMD perangkat daerah penunjang yang terpenuhi. Terealisasi 5,55% dari target 100%. Capaian kinerja 5,55%. Hal ini dikarenakan adanya sub kegiatan yang tidak terealisasi.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah administrasi umum perangkat daerah dibagi jumlah seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah administrasi umum perangkat daerah x 100% (Tw-n)

$$= 100\% / 2 \times 100\%$$

$$= 50\%$$

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	100%
2.	Realisasi	50%
3.	Capaian	50%

Pencapaian kinerja kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Lapangan

Sasaran sub kegiatan yaitu Tersedianya kendaraan dinas / operasional lapangan. Pada triwulan 1 sub kegiatan ini belum ditargetkan, namun proses koordinasi dan negosiasi dengan pihak penyedia barang mulai dilakukan.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	0 Unit
2.	Realisasi	0 Unit
3.	Capaian	0%

1.6.2. Pengadaan Mebel

Sasaran sub kegiatan yaitu tersediannya mebel. Ditargetkan 34 unit mebel yang disediakan, namun tidak terealisasi atau capaian kinerja 0%. Hal ini dikarenakan negosiasi pejabat pengadaan dengan rekanan yang alot

sehingga kontrak diterbitkan melewati dari waktu yang ditentukan (kontrak terbit bulan April 2024).

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah paket mebel yang disediakan (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	34 Unit
2.	Realisasi	0 Unit
3.	Capaian	0 Unit

1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin

Sasaran kinerja sub kegiatan yaitu Tersedianya peralatan/mesin. Pada triwulan 1 belum ditargetkan.

Formula menghitung realisasi capaian kinerja adalah

Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	0 Unit
2.	Realisasi	0 Unit
3.	Capaian	0%

1.6.4. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya Gedung kantor atau bangunan lainnya. Ditargetkan 2 unit, terealisasi 2 unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan yaitu pengadaan papan nama/tugu kantor; dan pengadaan parkir kendaraan. Dengan capaian kinerja 100%

Formula menghitung realisasi capaian kinerja adalah

Jumlah unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	2 Unit
2.	Realisasi	2 Unit
3.	Capaian	100%

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Terealisasi 100% dari target 100%. Capaian kinerja 100%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi jumlah seluruh sub kegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah X 100% (Tw-n)

$$= 300\% / 3 \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	100%
2.	Realisasi	100%
3.	Capaian	100%

Pencapaian kinerja kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat. Ditargetkan 1 laporan, terealisasi 1 laporan penyediaan jasa surat menyurat. Dengan capaian kinerja 100%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan
3.	Capaian	100%

1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik. Ditargetkan 1 laporan, terealisasi 1 laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik. Dengan capaian kinerja 100%

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan
3.	Capaian	100%

1.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran sub kegiatan yaitu Tersedianya jasa pelayanan umum kantor. Ditargetkan 1 laporan, terealisasi 1 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Dengan capaian kinerja 100%

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 Laporan
2.	Realisasi	1 Laporan
3.	Capaian	100%

1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai. Indikator kinerja yaitu Persentase barang milik daerah penunjang pemerintahan yang terpelihara dengan baik. Terealisasi 29,63% dari target 100%. Capaian kinerja 29,63%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan} \\ & \text{Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan} \\ & \text{Daerah dibagi jumlah seluruh sub kegiatan pada kegiatan} \\ & \text{Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan} \\ & \text{Daerah} \times 100\% \text{ (Tw-n)} \\ & = 119\% / 4 \text{ Sub Kegiatan} \times 100\% \\ & = 29,75\% \end{aligned}$$

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	100%
2.	Realisasi	29.75%
3.	Capaian	29.75%

1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Ditargetkan 4 unit, terealisasi 4 unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Dengan capaian kinerja 100%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang} \\ & \text{dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Tw-n)} \end{aligned}$$

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	4 unit
2.	Realisasi	4 unit
3.	Capaian	100%

1.8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Ditargetkan 21 unit, terealisasi 4 unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Dengan capaian kinerja 19%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	21 unit
2.	Realisasi	4 unit
3.	Capaian	19%

1.8.3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya. Ditargetkan 1 unit, terealisasi 0 unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Dengan capaian kinerja 0%. Hal ini dikarenakan belum ada rekanan yang bersedia melakukan pekerjaan perbaikan gedung kantor sesuai dengan anggaran yang disediakan.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 unit
2.	Realisasi	0 unit
3.	Capaian	0%

1.8.4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya. Ditargetkan 1 unit, terealisasi 0 unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Dengan capaian kinerja 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan ini sifatnya disediakan, apabila ada sarana dan prasarana kantor yang perlu dilakukan pemeliharaan

Formula menghitung capaian kinerja adalah

Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Tw-n)

Table
Capaian Kinerja

No	Uraian	Triwulan 1
1.	Target	1 unit
2.	Realisasi	0 unit
3.	Capaian	0%

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 37.851.659.559,- (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri dari belanja Operasi Rp. 36.568.774.559,- dan belanja modal Rp. 1.282.885.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 413.809.050,- atau 1,09% berdasarkan anggaran tahunan.

Untuk pagu anggaran berdasarkan anggaran kas triwulan 1 sebesar Rp. 31.470.141.599,- (*Tiga puluh satu milyar empat ratus*

tujuh puluh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah). Terealisasi sebesar Rp. 413.809.050,- atau 1,31%. Berikut anggaran 2024 dan realisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :



**Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun
2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	4,026,200,184	1,218,831,959	307,781,162	25.25	911,050,797	74.75	3,718,419,022	92.36
1.	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	75,353,003	20,861,303	6,144,450	29.45	14,716,853	70.55	69,208,553	91.85
1.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	38,392,300	9,527,800	3,135,600	32.91	6,392,200	67.09	35,256,700	91.83
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	4,492,400	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0	4,492,400	100.00
3	Evaluasi kinerja perangkat daerah	32,468,303	11,333,503	3,008,850	26.55	8,324,653	73.45	29,459,453	90.73
2.	<i>Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah</i>	1,986,362,901	779,685,248	233,489,287	29.95	546,195,961	70.05	1,752,873,614	88.25
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1,895,421,301	759,438,148	28,763,437	30.12	530,674,711	69.88	1,666,657,864	87.93
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	90,941,600	20,247,100	4,725,850	23.34	15,521,250	77	86,215,750	94.80
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	8,139,900	1,193,900	793,900	66.50	400,000	34	7,346,000	90.25

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	8,139,900	1,193,900	793,900	66.50	400,000	34	7,346,000	90.25
4.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	59,822,100	21,460,525	3,647,500	17.00	17,813,025	83.00	56,174,600	93.90
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30,262,100	10,020,525	1,987,500	19.83	8,033,025	80.17	28,274,600	93.43
2.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	29,560,000	11,440,000	1,660,000	14.51	9,780,000	85.49	27,900,000	94.38
5.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	447,337,280	161,056,483	45,314,367	28.14	115,742,116	71.86	402,022,913	89.87
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2,883,720	822,936	822,936	100.00	-	0.00	2,060,784	71.46
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,500,000	42,500,000	-	0.00	42,500,000	100.00	42,500,000	100.00
3.	Penyediaan bahan logistik kantor	7,538,810	3,226,859	2,156,489	66.83	1,070,370	33.17	5,382,321	1.39
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,314,750	2,828,688	300,000	10.61	2,528,688	89.39	11,014,750	97.35
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6,720,000	1,120,000	1,040,000	92.86	80,000	7.14	5,680,000	84.52
6.	Fasilitasi kunjungan tamu	8,470,000	2,585,000	-	0.00	2,585,000	100.00	8,470,000	100.00
7.	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	367,910,000	107,973,000	40,994,942	37.97	66,978,058	62.03	326,915,058	88.86
6.	<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	1,240,385,000	137,560,000	-	0.00	137,560,000	100.00	1,130,825,000	91.17
1	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional</i>	1,070,325,000	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1,070,325,000	100.00
2	<i>Pengadaan Mebel</i>	28,000,000	28,000,000	-	0.00	28,000,000	100	28,000,000	100.00
3	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	32,500,000	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	2,500,000	100.00
4	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	109,560,000	109,560,000	-	0.00	109,560,000	100	109,560,000	100.00
7.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	106,300,000	21,484,500	11,481,658	53.44	10,002,842	46.56	94,818,342	89.20
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1,000,000	309,500	-	0.00	309,500	100.00	1,000,000	100.00
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43,500,000	10,875,000	8,481,658	77.99	2,393,342	22.01	35,018,342	80.50

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	61,800,000	10,300,000	3,000,000	29.13	7,300,000	70.87	58,800,000	95.15
8.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	102,500,000	75,530,000	6,910,000	9.15	68,620,000	90.85	95,590,000	93.26
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	21,000,000	4,600,000	4,600,000	100.0	-	0.00	16,400,000	78.10
2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	22,000,000	11,430,000	2,310,000	20.21	9,120,000	79.79	19,690,000	89.50
3.	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	50,000,000	50,000,000	-	0.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00
4.	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	9,500,000	9,500,000	-	0.00	9,500,000	100.00	9,500,000	100.00
02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,291,192,300	35,385,400	32,410,228	91.59	2,975,172	8.41	1,258,782,072	97.49
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1,291,192,300	35,385,400	32,410,228	91.59	2,975,172	8.41	1,258,782,072	97.49
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang wawasan kebangsaan , bela negara, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	43,055,900	3,220,000	1,917,000	59.53	1,303,000	40.47	41,138,900	95.55
2	Pembentukan Paskibraka	1,248,136,400	32,165,400	30,493,228	94.80	1,672,172	5.20	1,217,643,172	97.56
03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	30,734,119,565	29,861,627,630	48,562,500	0.16	29,813,065,130	99.84	30,685,557,065	99.84

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1.	Perumusan Kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	30,734,119,565	29,861,627,630	48,562,500	0.16	29,813,065,130	99.84	30,685,557,065	99.84
1.	Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	191,192,000	61,365,000	34,415,000	56.08	26,950,000	43.92	156,777,000	82.00
2.	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	30,467,142,365	29,759,921,230	-	0.00	29,759,921,230	100.00	30,467,142,365	100.00
3.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	75,785,200	40,341,400	14,147,500	35.07	26,193,900	64.93	61,637,700	81.33
04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	58,543,600	17,000,000	1,000,000	5.88	16,000,000	94.12	57,543,600	98.29

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	58,543,600	17,000,000	1,000,000	5.88	16,000,000	94.12	57,543,600	98.29
1.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	58,543,600	17,000,000	1,000,000	5.88	16,000,000	94.12	57,543,600	98.29
05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	588,557,460	41,385,460	9,665,160	23.35	31,720,300	76.65	578,892,300	98.36
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	588,557,460	41,385,460	9,665,160	23.35	31,720,300	76.65	578,892,300	98.36
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	588,557,460	41,385,460	9,665,160	23.35	31,720,300	76.65	578,892,300	98.36
06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	1,153,046,450	295,911,150	14,390,000	4.86	281,521,150	95.14	1,138,656,450	98.75
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	1,153,046,450	295,911,150	14,390,000	4.86	281,521,150	95.14	1,138,656,450	98.75

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 MARET 2024		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	1,116,689,750	285,591,150	9,960,000	3.49	275,631,150	96.51	1,106,729,750	99.11
2.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	36,356,700	10,320,000	4,430,000	42.93	5,890,000	57.07	31,926,700	87.82
TOTAL BELANJA		37,851,659,559	31,470,141,599	413,809,050	1.31	31,056,332,549	98.69	37,437,850,509	98.91

BAB IV PENUTUP

Dari hasil pengukuran dan pelaporan terhadap capaian kinerja Triwulan I yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kinerja memuat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja Triwulan I ini menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban sekaligus menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara umum hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur pada triwulan 1 Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persentase capaian kinerja sasaran strategis-1 yaitu *“Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis”* pada triwulan 1 belum ditargetkan, karena pengukuran indeks kerukunan umat beragama dilaksanakan diakhir tahun berjalan (Tw.4);
2. Realisasi kinerja sasaran strategis-2 yaitu *“Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum”* pada triwulan 1 adalah *82,39% dari target 81% dengan capaian kinerja 101,71%*;
3. Persentase capaian kinerja program yang mendukung sasaran strategis-3 yaitu *“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD”* adalah 81.22%
4. Realisasi anggaran berdasarkan anggaran kas triwulan 1 sebesar Rp. 413,809,050,- atau 1.31% dan berdasarkan pagu anggaran kas, dan 1,09% berdasarkan anggaran tahunan
5. Factor yang menjadi penghambat pencapaian realisasi anggaran triwulan 1 tahun 2024 yaitu :
 - a) Terdapat beberapa sub kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b) Proses pengajuan spj yang terlambat, sehingga tidak dapat diproses keuangan atau GU;
 - c) Server pada aplikasi keuangan yang selalu error dan over capacity sehingga menghambat pengajuan pertanggungjawaban

6. Rekomendasi

Upaya - upaya yang direkomendasikan untuk meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol

- a) Percepatan realisasi anggaran
- b) Meningkatkan monitoring dan evaluasi berjenjang terhadap perjanjian kinerja
- c) Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang tertuang dalam KAK dan anggaran kas yang telah ditetapkan
- d) Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
- e) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral